



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 474 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025-2027

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa stabilitas laju inflasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai pencapaian sasaran pembangunan nasional;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, diperlukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Kabupaten Ngawi dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ngawi dalam Keputusan Bupati Ngawi. Serta dalam rangka perbaikan kinerja dan percepatan pelaksanaan implementasi pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Ngawi, perlu diperkuat dengan dasar pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ngawi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027;
9. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/15/404.101.2/B/2025 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2027, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mengatur :
- a. Program strategis, program kerja, program teknis dan timeline target selama tahun 2025 – 2027;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi data terhadap program kerja untuk dilakukan melalui program teknis pada masing-masing dinas;
 - c. Pelaksanaan program teknis sesuai dengan timeline target yang telah ditentukan;
 - d. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program kerja yang berkaitan dengan pengendalian inflasi untuk dilaporkan kepada sekretariat TPID Kabupaten Ngawi sebagai bahan evaluasi rutin;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan pengendalian inflasi daerah kepada TPID Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 25 November 2025
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Sdr. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR :100.3.3.2/ 474 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 25 November 2025

TABEL ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2027

4K	Program strategis	Program kerja	Program teknis	Timeline Target			Instansi Pengampu
				2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
Keterjangkauan Harga	Penguatan Pelaksanaan Operasi Pasar	Penguatan pelaksanaan Operasi Pasar dalam rangka penyediaan komoditas dengan harga terjangkau melalui koordinasi lintas instansi untuk stabilisasi harga bahan pokok	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pilot operasi pasar berbasis data harga dan stok			Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Intensifikasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok	Uji coba EPIK di pasar	Implementasi penuh di pasar besar			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Optimalisasi pelaksanaan sidak pasar sebagai upaya pemantauan dan pengawasan kesesuaian harga serta ketersediaan stok bahan pokok di tingkat pasar	Optimalisasi pemanfaatan EPIK (instore atau mobile) untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga stabil	Uji coba EPIK	Implementasi penuh di pasar besar			Dinas ketahanan pangan dan pertanian , Perum Bulog , Kancab Madiun

1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Penguatan peran Koperasi Merah Putih/BUMD/BUMDes sebagai supplier pasokan EPK		Identifikasi & penetapan pemasok utama	Berperan sebagai offtaker utama stabilisasi	Bagian Perekonomian
		Peningkatan produksi komoditas peternakan dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Fasilitasi Sarana Produksi Tanaman Pangan	Pendaftaran kebutuhan dan penyaluran sarana	Pendaftaran kebutuhan dan penyaluran sarana		Dinas Perikanan dan Peternakan
			Fasilitasi Sarana Produksi Tanaman Hortikultura	Bantuan benih hortikultura unggul dan Pelatihan teknik budidaya hortikultura	Bantuan benih hortikultura unggul dan Pelatihan teknik budidaya hortikultura		Dinas ketahanan pangan dan pertanian
		Peningkatan pemanfaatan sarana produksi pertanian (saprodi) yang berkualitas (termasuk organik)	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Pemetaan wilayah rawan OPT dan Implementasi pengendalian OPT terpadu	Pemetaan wilayah rawan OPT dan Implementasi pengendalian OPT terpadu		Dinas ketahanan pangan dan pertanian
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Pelatihan adaptasi iklim	Mitigasi risiko gagal panen		Dinas ketahanan pangan dan pertanian

1	2	3	4	5	6	7	8
		Modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) melalui program bantuan dan pelatihan teknis kepada petani	Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen	Pengadaan alsintan pra panen dan pelatihan	Pengadaan alsintan pra panen dan pelatihan	Dinas ketahanan pangan dan pertanian	
		Penguatan bimbingan teknis berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil produksi	Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) Tanaman Hortikultura	Pelatihan GAP hortikultura dan Pendampingan penerapan GAP	Pelatihan GAP hortikultura dan Pendampingan penerapan GAP	Pendampingan kelompok tani	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
		Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) Tanaman Pangan	Pelatihan GAP agricultural dan Pendampingan penerapan GAP	Pelatihan GAP agricultural dan Pendampingan penerapan GAP	Pelatihan GAP agricultural dan Pendampingan penerapan GAP	Dinas ketahanan pangan dan pertanian	
		Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) Tanaman Hortikultura	Pelatihan GHP hortikultura dan Pendampingan penerapan GH	Pelatihan GHP hortikultura dan Pendampingan penerapan GH	Pelatihan GHP hortikultura dan Pendampingan penerapan GH	Dinas ketahanan pangan dan pertanian	
		Penerapan Good Handling Practices (GHP) Tanaman Pangan	Pelatihan GHP pangan dan Pendampingan penerapan GHP	Pelatihan GHP pangan dan Pendampingan penerapan GHP	Pelatihan GHP pangan dan Pendampingan penerapan GHP	Dinas ketahanan pangan dan pertanian	

1	2	3	4	5	6	7	8
KELANCARAN DISTRIBUSI	Pengembangan Kawasan Produksi	Pengendalian hama dan penyakit serta mitigasi dampak perubahan iklim	Manajemen Tanaman Sehat	Sosialisasi dan pendampingan MTS	Sosialisasi dan pendampingan MTS	Dinas ketahanan pangan dan pertanian	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
			Pemantauan luas seongan OPT/DPI	Pemetaan lokasi	Pelaporan bulanan untuk dasar intervensi		
		Optimalisasi pemanfaatan lahan dan pekarangan melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi	Teras Pangan Bergam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Sosialisasi B2SA kepada rumah tangga, PKK, dan sekolah		Dinas ketahanan pangan dan pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan, DP3AKB	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	Peningkatan Infrastruktur Irigasi	Revitalisasi saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier untuk memastikan ketersediaan air yang optimal bagi lahan pertanian	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJT)	Identifikasi jaringan irigasi	Identifikasi jaringan irigasi	Rehabilitasi saluran irigasi	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Irigasi Permukaan	Identifikasi jaringan irigasi	Identifikasi jaringan irigasi	Rehabilitasi saluran irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Identifikasi jaringan irigasi	Identifikasi jaringan irigasi	Rehabilitasi saluran irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan area persawahan untuk mendukung mekanisasi pertanian dan meningkatkan efisiensi produksi	Infrastruktur jaringan listrik pendukung irigasi pompaniasi	Pemasangan jaringan listrik untuk mendukung pompaniasi sawah tada hujan	Pemasangan jaringan listrik untuk mendukung pompaniasi sawah tada hujan	Dinas ketahanan pangan dan pertanian , PLN UP3 Madiun

1	2	3	4	5	6	7	8
Penguatan Kelembagaan Petani	Pengembangan korporasi petani untuk meningkatkan skala ekonomi dan daya saing melalui pembentukan badan usaha kelompok tani	Fasilitasi Pengembangan Korporasi Petani Kabupaten Ngawi	Pemetaan kelompok tani	Pengembangan jaringan pemasaran dan kerja sama dengan offtaker	Pengembangan jaringan pemasaran dan kerja sama dengan offtaker	Dinas ketahanan pangan dan pertanian	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
Penguatan kapasitas lumbung pangan sebagai buffer stock untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi	Penyaluran perkoperasian kepada kelompok tani di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan	Pelatihan pengelolaan	Pembentukan unit usaha koperasi sesuai komoditas	Pembentukan unit usaha koperasi sesuai komoditas	Dinas ketahanan pangan dan pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan	Dinas ketahanan pangan dan pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan
Mendukung penguatan mekanisme peningkatan CBP Nasional melalui optimalisasi penyerapan gabah beras di seluruh wilayah Jawa Timur	Koordinasi awal dengan stakeholder terkait	Integrasi data stok lumbung pangan dengan sistem informasi TPID untuk respon cepat gejolak harga	Integrasi data stok lumbung pangan dengan sistem informasi TPID untuk respon cepat gejolak harga	Integrasi data stok lumbung pangan dengan sistem informasi TPID untuk respon cepat gejolak harga	Dinas ketahanan pangan dan pertanian	Dinas ketahanan pangan dan pertanian	Dinas ketahanan pangan dan pertanian

1	2	3	4	5	6	7	8
Penguatan akses pembiayaan petani melalui fasilitasi kerjasama dengan lembaga keuangan formal	Bersinergi dengan koperasi merah putih dan perbankan dalam pendaftaran serta kerja sama dengan BUMD dan BUMDes sekitar	Bersinergi dengan koperasi merah putih dan perbankan dalam pendaftaran serta kerja sama dengan BUMD dan BUMDes sekitar	Pilot project akses pembiayaan pada komoditas prioritas & Pendampingan teknis dan administrasi	Penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinergi	Penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinergi	Dinas Koperasi dan UKM , Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa,Perbankan, Bagian Perekonomian	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Peternakan , Bagian Perekonomian
Pendampingan penyusunan laporan keuangan untuk pengembangan akses pembiayaan masyarakat di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan	Pelatihan dasar pencatatan keuangan sederhana & Penyelarasan standar pencatatan keuangan	Monitoring keberhasilan akses pembiayaan & Pembentukan jejaring kemitraan jangka panjang antara kelompok tani/nelayan dengan lembaga keuangan formal	Monitoring keberhasilan akses pembiayaan & Pembentukan jejaring kemitraan jangka panjang antara kelompok tani/nelayan dengan lembaga keuangan formal	Monitoring keberhasilan akses pembiayaan & Pembentukan jejaring kemitraan jangka panjang antara kelompok tani/nelayan dengan lembaga keuangan formal	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas	

1	2	3	4	5	6	7	8
Penguatan SDM Pertanian	Pembentukan komunitas petani milental untuk mendorong modernisasi dan digitalisasi sektor pertanian (Youth Agriculture Hub)	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian dalam Bentuk Pelatihan Singkat Tematic	Pemben- tukan kelemba- gaan awal Youth Agriculture Hub	Inkubasi usaha tani milental: pendampingan permodalan, akses KUR, dan manajemen bisnis & Evaluasi dampak terhadap inflasi komoditas pangan dan perbaikan model pendampingan.	Inkubasi usaha tani milental: pendampingan permodalan, akses KUR, dan manajemen bisnis & Evaluasi dampak terhadap inflasi komoditas pangan dan perbaikan model pendampingan.	Inkubasi usaha tani milental: pendampingan permodalan, akses KUR, dan manajemen bisnis & Evaluasi dampak terhadap inflasi komoditas pangan dan perbaikan model pendampingan.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penguatan Kerjasama Antar Daerah, pada level Pemerintah atau Bisnis	Penguatan peran Koperasi/BUMD/ Des sebagai offtaker strategis untuk menjamin penyerapan hasil produksi petani dengan harga yang layak	Program Penguatan peran Koperasi/BUMD/ Des sebagai offtaker komoditas strategis	Identifikasi dan penetapan skema kerjasama	Implementasi awal / pilot project	Perluasan peran dan integrasi dengan retribusi daerah	Perluasan UKM , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , SETDA	Dinas Koperasi dan UKM , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , SETDA
Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) lintas provinsi dan kabupaten/kota melalui skema business to business (B2B) yang berkelanjutan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pemetaan potensi kerjasama antar daerah	Penandatanganan kesepakatan KAD dan pelaksanaan penuh program pemasaran produk dalam negeri.	Penandatanganan kesepakatan KAD dan pelaksanaan penuh program pemasaran produk dalam negeri.	Penandatanganan kesepakatan KAD dan pelaksanaan penuh program pemasaran produk dalam negeri.	Penandatanganan kesepakatan KAD dan pelaksanaan penuh program pemasaran produk dalam negeri.	Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan dan Pertanian, SETDA
Peningkatan Kualitas Infra Produksi & Konektivitas	Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi distribusi barang serta mobilitas masyarakat	Pemeliharaan Rutin Jalan	berjalan setiap tahun sebagai program wajib	berjalan setiap tahun sebagai program wajib	berjalan setiap tahun sebagai program wajib	berjalan setiap tahun sebagai program wajib	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	2	3	4	5	6	7	8
KOMUNIKASI EFEKTIF	Penguatan Koordinasi Pusat - Daerah	Penyelenggaraan High Level Meeting untuk memastikan sinkronisasi kebijakan Provinsi dan Kab/Kota, serta langkah strategis dalam pengendalian inflasi	High Level Meeting (HLM) TPID Kota/Kab yang dipimpin oleh Bupati/Walikota /Sekretaris Daerah	Konsolidasi awal antar-OPD untuk pemetaan hambatan pengendalian inflasi dan penyusunan solusi lintas sektor	Konsolidasi awal antar-OPD untuk pemetaan hambatan pengendalian inflasi dan penyusunan solusi lintas sektor	Melaksanakan HLM secara reguler (minimal triwulan) dengan fokus pada monitoring capaian 4K (Ketersediaan, Keterjangkauan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi)	Bagian Perekonomian
		Penyuatan koordinasi antar Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah Tim Pengendalian Inflasi (TPID) melalui forum rapat koordinasi Penyelegaraan rapat koordinasi wilayah untuk membahas isu-isu regional dan solusi bersama	Raker rutin TPID dengan Kabupaten Ngawi dengan standar pelaporan lintas OPD.	berjalan setiap tahun sebagai program wajib	berjalan setiap tahun sebagai program wajib	berjalan setiap tahun sebagai program wajib	Bagian Perekonomian
		Penyusunan produk kebijakan pengendalian inflasi yg kredibel sebagai tindak lanjut komunikasi dan koordinasi antar stakeholder untuk menjaga pola ekspektasi dan psikologis konsumen	Rapat Teknis Tematik Pengendalian Inflasi	berjalan setiap tahun sebagai program wajib	berjalan setiap tahun sebagai program wajib	berjalan setiap tahun sebagai program wajib	Bagian Perekonomian

1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Kualitas Data	Optimalisasi pemanfaatan portal Satu Data Jawa Timur melalui Penguatan Kualitas dan Keterisian Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Koordinasi Sektoral yang memenuhi Proses Bisnis Statistik	Pemetaan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk peningkatan pemanfaatan portal Satu Data untuk pengambilan keputusan TPID.	Penguatan kualitas data, integrasi lintas sektor, serta peningkatan pemanfaatan portal Satu Data untuk pengambilan keputusan TPID.	Penguatan kualitas data, integrasi lintas sektor, serta peningkatan pemanfaatan portal Satu Data untuk pengambilan keputusan TPID.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Penataan pasar dan digitalisasi pasar	Konsolidasi Data, Identifikasi Kebutuhan, dan Penyiajapan Infrastruktur	Inventarisasi data kebutuhan dan ketersediaan pangan	Penyusunan rekomendasi kebijakan tahunan berdasarkan proyeksi neraca & Integrasi sistem data pangan dengan sistem informasi daerah dan nasional	Penyusunan rekomendasi kebijakan tahunan berdasarkan proyeksi neraca & Integrasi sistem data pangan dengan sistem informasi daerah dan nasional	Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Pengendalian Ekspektasi Inflasi	Penyusunan neraca pangan daerah untuk mendukung perencanaan ketahanan pangan dan stabilisasi harga	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Penyusunan pedoman komunikasi publik pengendalian inflasi	Pelaksanaan kampanye melalui penayangan konten edukasi melalui berbagai media & Peluncuran dashboard publik informasi harga pangan berbasis digital sebagai bentuk edukasi jangka panjang	Pelaksanaan kampanye melalui penayangan konten edukasi melalui berbagai media & Peluncuran dashboard publik informasi harga pangan berbasis digital sebagai bentuk edukasi jangka panjang	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan transparansi informasi harga melalui platform yang mudah diakses oleh masyarakat umum	Publikasi Buletin Harga Pangan Melalui Videotron	Penayangan awal informasi harga di videotron dan kanal media sosial	Kolaborasi dengan pedagang, distributor, dan agen untuk memperbarui data harga secara cepat & Digitalisasi penuh sistem informasi harga (dashboard interaktif)	Kolaborasi dengan pedagang, distributor, dan agen untuk memperbarui data harga secara cepat & Digitalisasi penuh sistem informasi harga (dashboard interaktif)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Peningkatan Kapasitas Pejuang Inflasi	Pemenuhan Data untuk TPID Awards	TPID Awards Tingkat Kab/Kota	TPID Award dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk apresiasi dan pemacu kinerja OPD dalam Pengendalian Inflasi	TPID Award dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk apresiasi dan pemacu kinerja OPD dalam Pengendalian Inflasi	Bagian Perekonomian
		Peningkatan kapasitas anggota TPID melalui pelatihan/ workshop, dan studi banding	Capacity Building TPID Kab/Kota	Capacity Building TPID dilakukan tiap tahun untuk memperkuat kapasitas analisis, respon cepat, dan koordinasi teknis	Capacity Building TPID dilakukan tiap tahun untuk memperkuat kapasitas analisis, respon cepat, dan koordinasi teknis	Bagian Perekonomian	

BUPATI NGAWI,

ttt.

ONY ANWAR HARSONO